

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI TERHADAP STRATEGI INDUSTRIALISASI

F. Rahardjo Setiobudi

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: fradho@yahoo.com

Abstract

Government policy in industrial sector was considered 'fail' in industrialization in Indonesia because it ignored innovation culture and resource potency. Both were based on the human problem as the main step of life. The experiences in many countries in which their process of industrialization always succeeded proved that they always gave priority to human as the source and also the goal of the industrial creation itself. On the other side, the law function as the medium of industrialization in Indonesia could not grow innovation culture either because it merely served economy activities of industrialization. The idea proposed to improve this case was the use of the two pillars, namely innovation culture and social structure, as the industrialization planning foundation and the law function or use in economic development in Indonesia.

Key words: *innovation culture, economic law, Industrialization strategy*

Mengkaji suatu kebijakan pada hakekatnya melakukan analisis terhadap wawasan dasar, tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan itu, cara yang ditempuh termasuk penyediaan sarana prasarannya sampai kepada hasil yang diperoleh sebagai implementasi kebijakan tersebut. Hal itu tentu menjadi makin kompleks telaah dan bahasan kemudian bila dikaitkan dengan persoalan upaya terencana dalam suatu proses pembangunan.

Oleh karena pada hakekatnya industrialisasi dianggap hanya sebagai *tujuan antara* dalam proses pembangunan yang secara final bertujuan hendak menguak potensi suatu bangsa bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya tetap berada dalam koridor yuridis, dan tetap pula berada pada koridor legitimasi pegaulan internasional.

Menggagas dengan kerangka yang demikian itu atas kebanggaan perekonomian pada masa

Orde Baru yang mengagungkan sektor industri dihadapan sektor pertanian harus diterima sebagai sistem wawasan yang benar walau kenyataan pada masa krisis seperti sekarang ini adalah justru sebaliknya. Pada awal mula ditetapkannya industri menjadi tumpuan memang beralasan sebagai jalan pintas memotong kegiatan impor sebagai bentuk ketergantungan.

Hal di atas, menjadikan industri substitusi impor sekaligus menjadi dasar industrialisasi dan strategi kebijakan industri pada masa-masa sesudahnya. Dimaksudkan bahwa wawasan awal tentang industrialisasi itu, yakni industri substitusi impor, berpengaruh terhadap kebijakan industri yang kemudian menjadi strategi pembangunan nasional.

Oleh karena industrialisasi dikenali pertamanya sebagai substitusi impor maka banyak aspek

dari industri itu sendiri yang seharusnya memperoleh perhatian utama menjadi terabaikan karena terpancang pada tujuan menyeimbangkan neraca perdagangan belaka. Aspek-aspek industri yang terabaikan itu yang utama adalah budaya inovasi (Parangtropo, 1994, 3), potensi sumberdaya (Soewito, 1999, 2), dan penggunaan hukum bagi kegiatan ekonomi (Marzuki, 1998, 15).

Demikian karena industrialisasi bukanlah berujud sekadar pengolahan sesuatu untuk menghasilkan produk tertentu saja, dan dengan menempatkannya kegiatan itu di dalam negeri serta merta neraca dagang kita dapat di-*balance*. Lebih dari itu industrialisasi memiliki makna proses aktualisasi segala potensi manusia baik sebagai sumber maupun tujuan penciptaan teknologi itu sendiri; pun bermakna dalam rangka terbentuknya realitas sosial baru yang dapat mengembangkan infrastruktur guna menopang kehidupan industrial yang jelas akan makin kompleks di kemudian hari.

Oleh karenanya industrialisasi tidak dapat dilepaskan dengan sistem budaya, politik, dan utamanya sistem ekonomi yang berkait langsung dengannya. Berdasarkan pemahaman yang demikian itu perlu dilakukan kajian, bila tidak dapat disebut sebagai evaluasi, atas apa yang telah disebut sebagai industrialisasi di Indonesia.

Arah bahasan kemudian bukanlah upaya penolakan atas industrialisasi, karena industrialisasi telah dianggap menjadi keniscayaan - proses yang terelakkan - bagi negara-negara berkembang, namun agar dapat ditimbang apakah landasan, tujuan, cara yang ditempuh dan penyediaan prasarannya akan sebanding dengan maksud dan tujuan industrialisasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

Bahwasanya industrialisasi di Indonesia berkembang pesat pada masa Orde Baru pada tahun 1960 hingga 1990an. Hal demikian mengemuka, sejalan dengan adanya revolusi industri dan perkembangan paradigma baru dalam strategi pengembangan wilayah berupa *growth pole* (kutub pertumbuhan) yang berbasis industri.

Pembangunan industri di Indonesia dilakukan melalui penetapan kawasan industri sedang dan besar. Pembangunan industri pada waktu itu dipandang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Pada perkembangan berikutnya, industri terutama di arahkan di Pulau Jawa, yang punya mobilitas tertinggi dibandingkan kawasan lain di Indonesia.

Industrialisasi sebagai Proses Aktualisasi

Bahwasanya pada awal industrialisasi muncul pada abad ke-18. Bermula dari revolusi industri di Inggris. Industrialisasi ini ditandai dengan penemuan metode baru dalam menciptakan spesialisasi produksi dan peningkatan produktivitas dari faktor produksi. Hal ini menandai berakhirnya era tradisional menuju era mesinisasi.

Sejak revolusi industri, konsep pembangunan sering disamakan dengan industrialisasi. Tidak ketinggalan dengan Indonesia. Menurut UU No.5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya.

Sedangkan industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, produksi, dan perdagangan yang pada akhirnya meningkatnya pendapatan masyarakat serta mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sebagai strategi pengembangan wilayah, industri memiliki tujuan dalam pengembangan wilayah, antara lain: 1) Untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. 2) Untuk pemerataan pembangunan wilayah. 3) Untuk mendukung pengembangan wilayah hinterland (*trickling down effect*). 4) Membuka peluang kerja luas dan penyerapan tenaga kerja tinggi.

Namun demikian, pada kenyataannya, tujuan-tujuan tersebut sulit untuk diterapkan, terutama di Indonesia. Tujuan yang sulit dicapai dalam industrialisasi di Indonesia yaitu berupa pemerataan pembangunan dan *trickling down effect*. Sulitnya penerapan tujuan ini secara umum dikarenakan kondisi Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah dan sosial budaya yang heterogen. Selain itu juga terdapat wilayah yang memiliki keterbatasan potensi sumber daya, infrastruktur dan juga produktivitas tenaga kerja.

Dalam kaitan dengan ini, pemerataan pembangunan tidak berhasil karena industri cenderung beroperasi di daerah-daerah dimana potensi dan kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini kemudian mereka dapatkan manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan.

Sesuai hal di atas, industri ini dapat berupa kawasan industri, sentra industri, klaster industri maupun industri tepusat. Pembentukan aglomerasi ini terutama mengangkut infrastruktur dan efisiensi ekonomi untuk biaya produksi. Untuk itulah di Indonesia pengembangan industri disuatu wilayah terutama industri besar sebagian besar ditempatkan pada wilayah dengan ketersediaan tenaga kerja tinggi dan aksesibilitas.

Dengan demikian sebagian besar pengembangan industri di lakukan di Pulau Jawa karena Pulau Jawa memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi dan ketersediaan infrastruktur sangat memadai dibandingkan wilayah Indonesia lainnya terutama Indonesia bagian Timur. Akibatnya, industrialisasi di Pulau Jawa berkembang sangat pesat.

Industrialisasi yang seharusnya dapat memberikan *trickling down effect* (efek penetes) bagi wilayah sekitarnya juga tidak berhasil dan malah menjadi *backwash effect* (efek penghisapan). Hal ini dikarenakan sebagian besar industri yang dikembangkan berupa industri yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

Hal di atas terjadi karena adanya dualisme ekonomi yaitu wilayah urban dengan industri dan wilayah rural yang umumnya pertanian. Akibatnya, terjadi kecenderungan urbanisasi dari daerah pedesaan, yang sulit berkembang dan memilih sektor industri karena lebih menguntungkan. Akibatnya wilayah urban menjadi pusat perkotaan yang sangat besar dan banyak menghisap sumber daya dari wilayah hinterland terutama sumber daya tenaga kerja.

Berdasarkan hal di atas, industrialisasi memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, sebagian besar strategi industrialisasi ini tidak dapat dilaksanakan karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik berbeda, industrialisasi tidak dapat diterapkan di semua wilayah. selain itu, pengembangan industrialisasi yang salah berupa *footloose industry* di suatu wilayah justru memberikan efek negatif bagi wilayah hinterlandnya. Untuk itulah pengembangan suatu industri harus memperhatikan potensi wilayah yang akan dikembangkan.

Tentang kebijakan pembangunan di bidang sains dan teknologi adalah sangat penting oleh karena diharapkan dapat menumbuhkan industrialisasi yang berdampak ekonomi sosial dan budaya. Dalam kerangka yang demikian itu industrialisasi pada awalnya dipahami sebagai suatu proses yang evolutif dan berjangka panjang, sehingga mustahil bila dikehendaki tumbuh dan berkembangnya seketika yang revolutif walaupun direncanakan sedetil dan serapi mungkin.

Oleh karena sifat teknologi yang melayani industrialisasi itu merupakan perjalanan panjang yang kompleks dikaitkan dengan sistem budaya masyarakatnya, maka kebijakan yang dibuat untuk melayaninya pun harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menjadi latar teknologi.

Kebijakan teknologi dengan demikian dapat dijadikan variabel dalam kajian terhadap industrialisasi sebagai suatu proses. Kesalahan dalam

mengambil langkah guna menetapkan kebijakan itu tidak hanya dapat menimbulkan industrialisasi tidak mencapai hasilnya namun pembangunan menjadi porak poranda.

Industrialisasi sebagai proses dipahami bila diterima awal mula lahirnya teknologi. Proses pertumbuhan itu, yang lajim disebut budaya sains, dimulai dari filsafat kemudian menjadi matematika, fisika selanjutnya diinovasikan pada teknologi-industri (Parangtropo, 1994:1). Industri yang mempergunakan teknologi itu dikelola untuk menghasilkan produk-produk dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Selanjutnya produk-produk itulah yang kemudian mengubah dinamika sosial baru dan menciptakan kesejahteraan sosial yang dikehendaki. Konsep demikian itu bergerak simultan dan tidak linear (Mantroll & Badger, 1974, 14-17).

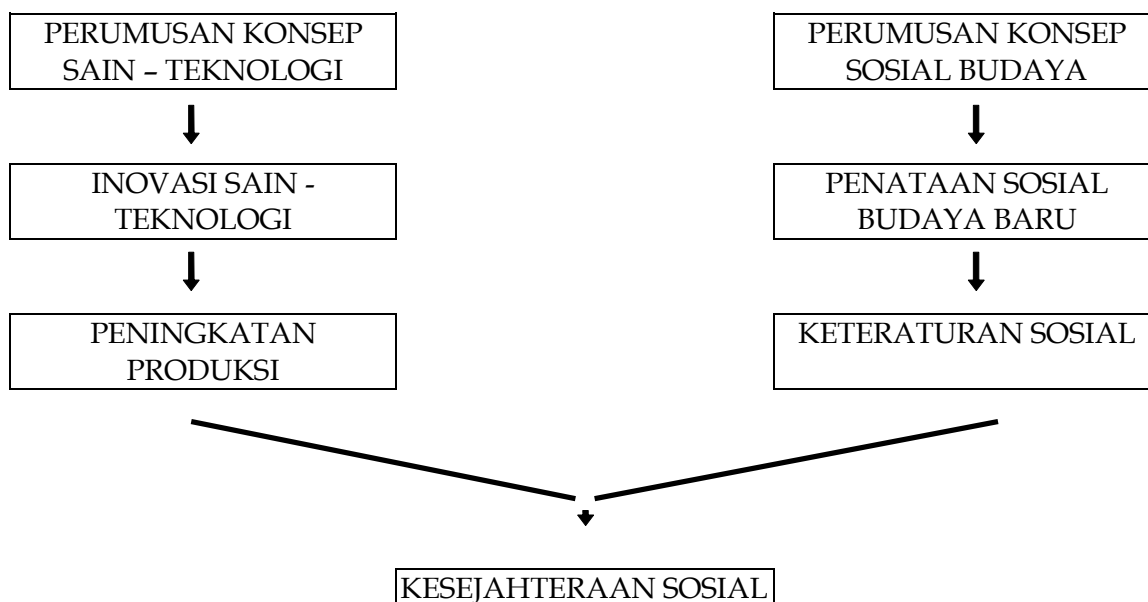
Dimaksudkan bahwa pada saat proses produksi dengan teknologi itu berlangsung saat itu pula muncul konsep sosial yang mencoba mencari bentuk penataan sosial yang baru dalam masyarakat yang seimbang dengan proses produksi yang

dipakai. Sebagai contoh secara historis, proses yang dialami bangsa Eropa pada abad delapan belas itu, telah memunculkan teori ekonomi pasar dari Adam Smith.

Hendak dikemukakan dengan bahasan di atas adalah kaitan yang kompleks antara pertumbuhan sains-teknologi dengan tatanan sosial. Kaitan yang tidak begitu saja terbentuk, namun masing-masing menjadi *natural setting* bagi yang lain dan munculnya pun evolutif sifatnya. Secara sederhana dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Apabila dikaji dari teori Parsons tentang kaitan antara kedua bidang itu dalam suatu struktur sosial, maka sains dan teknologi yang menjadi salah satu substansi dari subsistem budaya memberi ide, informasi, arahan pada subsistem sosial.

Oleh karenanya pun secara teoritika dapat diterima bahwa antara sains-teknologi dengan pranata sosial saling mempengaruhi dan secara fundamental bergerak ke arah *equilibrium* yang dinamis (Nasikun, 1989, 11) dengan tujuan menanggapi perubahan-perubahan dalam masyarakatnya, dalam hal ini adalah kesejahteraan sosial.



Mempertimbangkan telaah industrialisasi sebagai proses yang demikian itu, maka yang perlu dipertanyakan atas upaya pemerintah Orde Baru melakukan apa yang disebut industrialisasi adalah apakah kondisi sosial masyarakat bangsa Indonesia untuk tujuan itu turut dipertimbangkan?

Banyak ahli menyatakan di sinilah letak kesalahan Orde Baru yang mengabaikan proses aktualisasi dari sumberdaya manusia. Memahami industri sebagai proses dalam kegiatan ekonomi belaka, sehingga industrialisasi diputuskan sebagai jalan keluar menekan impor. Dibuktikan selanjutnya oleh cara yang ditempuh guna melayani kepentingan di atas, lahirnya pranata yang menarik pemodal asing ke Indonesia lewat Undang Undang tentang Penanaman Modal Asing untuk rangsangan kegiatan proses produksi barang-barang tertentu. Tujuannya agar kegiatan produksi dapat berlangsung di Indonesia, sehingga kita tidak lagi perlu mengimpor barang-barang tertentu itu.

Pemikiran yang terlalu sederhana itu telah membawa dampak berkelanjutan sampai kini, karena bidang industri yang dimaksud menimbulkan bentuk ketergantungan baru.

Memang ketergantungan terhadap barang dalam bentuk produk jadi impor menjadi berakumulasi, tetapi muncul ketergantungan akan bahan baku dan teknologi. Oleh karena pemodal asinglah yang memiliki posisi tawar lebih kuat daripada kita, dalam banyak aspek utamanya atas dua hal di atas: bahan baku dan teknologi, maka tidak dapat disangkal banyak ahli menyatakan munculnya pembangunan ketergantungan di negara-negara ketiga. Pada saat ini kedua aspek itu telah melebar pada aspek manajemen, sehingga bila bahan baku-teknologi-manajemen diatur oleh pemodal asing maka ketergantungan itu tidak mudah untuk disingkirkan.

Apabila dikaji ketiga aspek di atas: bahan baku-teknologi-manajemen pada hakekatnya tidak lain adalah hasil proses aktualisasi potensi sumberdaya manusia. Dengan demikian akan ber-

pengaruh pada kualitas sumberdaya manusia sebenarnya adalah yang utama dan pertama. Hal demikian dimaklumi sebagai semacam hukum alam yang membawa efek domino dari satu bagian ke bagian lain.

Tidak banyak negara berkembang yang memperhatikan status dan kualitas sumberdaya manusianya, karena mengharap adanya lompatan teknologi yang dicoba diperoleh melalui perjanjian alih teknologi. Walaupun hal itu dapat terlaksana, dalam realitas teknologi - penciptaan teknologi - terlebih pemilikannya, sulit akan memperoleh hasil yang sesungguhnya bila teknologi yang dialihkan tergolong cepat usang.

Lebih dari itu perkembangan teknologi hanya dapat terjadi, yang secara historis pun dibuktikan oleh pengalaman banyak bangsa Eropa-Jepang-Amerika, bila mana masyarakat bangsa memiliki kematangan dalam menyerap perubahan-perubahan yang terjadi pada saat proses produksi itu sendiri sedang berlangsung. Oleh karena perubahan itu sebagai stimulus perkembangan teknologi terjadi dalam setting budaya-sosial-ekonomi tertentu menurut waktunya sendiri, utamanya pada teknologi canggih (*high-tech*) yang memanfaatkan *microprocessor* serat optik.

Selain pengabaian aspek sumberdaya manusia, kebijakan industrialisasi di Indonesia dinilai ambisius sejak booming minyak pada tahun 1970-an yang merangsang pemerintah membelanjakan hasil minyak bumi untuk memfasilitasi pembangunan industri berat padat modal.

Terlebih dibarengi dengan kejajegan nilai tukar hampir dalam satu dasawarsa, telah ikut mendorong peningkatan arus modal asing padat teknologi yang akan membuat ketergantungan kita pada pihak luar makin kuat. Pola pengembangan yang demikian itu mengabaikan tahapan pertumbuhan yang wajar dalam industrialisasi sebagai proses. Oleh karena pola tatanan masyarakat yang lama harus menerima dan diberlakukan dalam konteks teknologi dengan budayanya yang

jelas berbeda, maka yang nampak sebagai eksek adalah kesenjangan kultural dalam masyarakat.

Bentuk lahir kesenjangan itu adalah pertama tidak berkembangnya teknologi walau telah dipergunakan dalam proses produksi dalam dua dasawarsa ini, yang sudah barang tentu juga telah banyak mengalami stimulus perubahan menurut kurun waktunya. Pada kondisi yang demikian, tidak ada hubungan sama sekali antara konsep sains-teknologi dengan konsep sosial yang berlaku dalam masyarakatnya.

Konsekuensi yang harus ditanggung adalah tidak adanya tujuan yang dapat dicapai dari dua bidang itu, karena masing-masing berjalan sendiri. Selain itu dapat pula ditunjuk beberapa penyakit sosial masyarakat kita yang dapat dikategorikan sebagai kelanjutan kesenjangan kultural itu, semisal perilaku konsumerisme dan *import-minded*.

Sistem Ekonomi Nasional sebagai Wahana Industrialisasi

Industrialisasi sebagai upaya manusia yang memanfaatkan inovasi sains-teknologi tidak berlangsung dalam suatu ruang hampa. Dalam pengertian itu bidang kehidupan yang terdekat yang menjadi wahana, seperti dikemukakan di atas tentang kaitannya yang langsung antara sains teknologi dengan ekonomi, maka sistem perekonomian suatu bangsa tidak dapat disangkal keberadaannya.

Indonesia pada awalnya telah menentukan dipergunakan-nya sistem ekonomi pasar sejak awal pemerintahan Orde Baru. Didorong oleh rangsangan yang dihadirkan oleh pranata Penanaman Modal Asing, arus modal dan teknologi dari luar berhasil diperoleh untuk ikut mengembangkan proses aktualisasi potensi bangsa yang ada dengan tujuan penetrasi impor. Peranan pemerintah yang dikehendaki oleh pranata tersebut lebih cenderung pada pengawasan arah kegiatan ekonomi, dan bukannya penguasaan. Dalam kerangka yang demi-

kian itu dapat disimpulkan diterimanya sistem ekonomi pasar.

Namun dalam kenyataannya, perjalanan perekonomian bangsa kita yang terjadi justru sebaliknya yakni makin besarnya peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi karena makin luasnya intervensi melalui pelbagai regulasi. Lebih dari itu sebagian pengamat bahkan menyatakan bahwa justru pemerintah menjadi pelaku langsung kegiatan produksi-distribusi-dan konsumsi. Keadaan itu nampaknya memanfaatkan ketidaksiapan sektor swasta, sampai dengan deregulasi dilakukan sekitar pertengahan dasawarsa 1980-an untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang mengisyaratkan tendensi sistem ekonomi sosialis.

Terlepas dari situasi itu nampaknya industrialisasi yang memang menjadi keniscayaan Indonesia sebagai negara berkembang disokong benar-benar untuk dapat diselenggarakan oleh pihak swasta, seperti diharapkan pada awalnya. Pelbagai kemudahan diberikan kepada swasta baik untuk mencari pendanaan asing langsung maupun secara tak langsung dalam bentuk penyediaan sarana prasarana industrialisasi. Aglomerasi industri ditampakkan oleh industri manufaktur dalam hampir empat dasawarsa terakhir ini, namun yang dapat dilihat dari kemajuan itu hanyalah konglomerasi dan pemusatan pertumbuhan. Konsekuensi dari hasil tersebut justru tidak menyokong tumbuhnya kesejahteraan sosial, sebaliknya makin nyata kesenjangan sosial akibat tidak meratanya penikmatan hasil industrialisasi dan terlebih tidak efisiennya proses produksi dalam industri.

Hal yang disebut terakhir sebagai syarat prakondisi (Basri, 1994, 6) bagi terselenggaranya industrialisasi yang diharapkan ternyata tidak terwujud. Oleh karena industrialisasi menghendaki peningkatan produktivitas yang seimbang dengan peningkatan efisiensi, namun karena terjadi konsentrasi kekuatan pasar pada kelompok usaha tertentu maka efisiensi tidak tergapai. Perlu dipahami

dalam kerangka ini sistem ekonomi yang hendak diterapkan yakni sistem ekonomi pasar menjadi rusak oleh monopoli dan oligopoli yang juga dimotori oleh birokrasi pemerintahan sendiri.

Kesimpangsiuran implementasi tentang sistem manakah yang sebenarnya akan mewedahi upaya industrialisasi dalam bahasan ini menjadi variabel tersendiri yang ikut memrakporandakan upaya industrialisasi itu sendiri. Dengan kata lain hendak dikemukakan bahwa sistem ekonomi pasar yang bertumpu pada efisiensi merupakan *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya industrialisasi (Marzuki, 1998, 5-12). Jadi bila efisiensi tidak berhasil diperoleh, industrialisasi dapat dikatakan tidak terselenggara dengan semestinya.

Bila dilakukan analisis terjadinya kondisi seperti itu, tidak dapat dielak intensitas intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang begitu besar yang menjadi penyebabnya. Walau intervensi memang dibutuhkan untuk mempertahankan persaingan sehat yang tentu dalam menjaga efisiensi. Metoda intervensi mungkin menjadi permasalahan, bila terlalu besar dan media yang dipergunakan salah maka yang terjadi adalah sebaliknya yakni inefisiensi.

Pengalaman pada masa pemerintahan Orde Baru menunjukkan begitu besarnya intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi secara langsung dengan mempergunakan media pranata hukum. Banyak pengamat menilai metoda itu tidak tepat, lebih tendensius kepada kepentingan tertentu dari kelompok usaha tertentu, dan yang sebaiknya justru intervensi tidak langsung melalui penyusunan anggaran belanja (budgeter) dengan media pajak. Disamping itu analisis kebijakan yang telah dilakukan (Marzuki, 1998, 21-22) bahwa pranata hukum yang dipakai untuk menjaga efisiensi dalam kegiatan produksi belum menjangkau struktur pasar maupun perilaku produsen.

Bahwasanya telaah tentang pengembangan industri di Indonesia, berkaitan dengan masalah perihalan jenis industri manakah yang hendak dikem-

bangkan: *high-tech* atau *soft-tech*, industri hulu atau hilir, sektor manakah yang diindustrialisasi?. Menjawab masalah itu tidak semudah seperti se-kadar menyatakan kehendak, oleh karena yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah kondisi sosial-internal bangsa Indonesia yang masih agraris, selain untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketergantungan karena jenis industri yang dikembangkan justru industri yang terikat akan pasokan bahan baku dari luar (*foot-loose*). Untuk itulah menimba pengalaman bangsa lain bukan suatu jalan yang sia-sia dan salah.

Lebih penting dari pelbagai masalah yang harus dijawab itu, adalah pola pengembangan industri sebagai strategi industrialisasi dalam kerangka pembangunan ekonomi. Mengacu pada sejarah perkembangan industri di negara-negara maju dapat dikemukakan adanya 4 macam pola pertumbuhan industri (Green, 1981) yang dapat dijadikan pedoman bagi upaya pengembangan industri di negara kita.

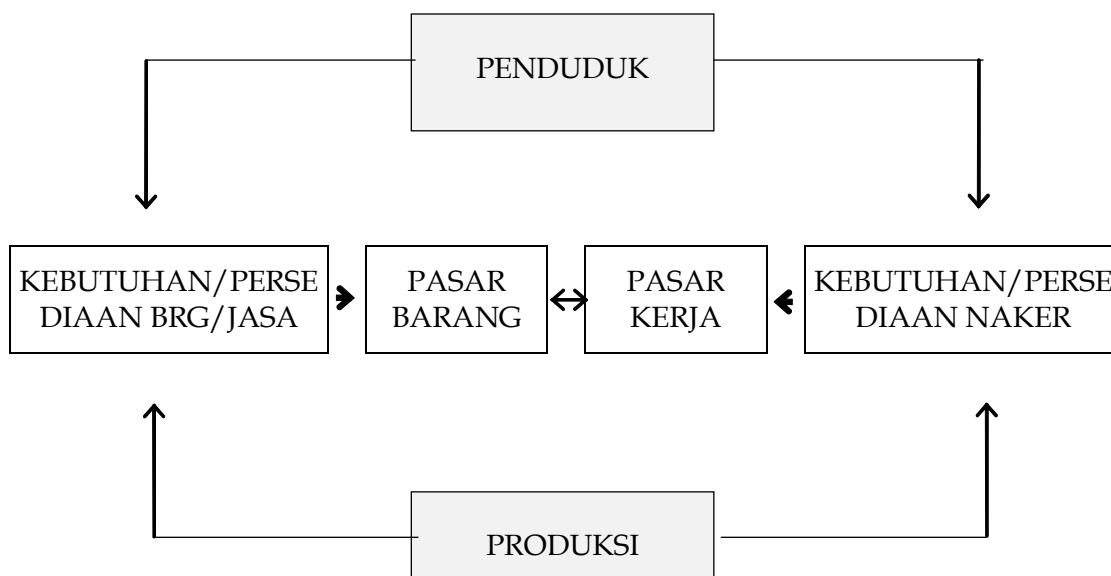
Walaupun pola yang ditampakkan dalam tahapan-tahapan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun setidaknya prasyarat masing-masing pola yang dapat dikenali kesamaan-nya dengan kondisi industri di negara kita sehingga dapat menunjukkan arah pengembangan yang seharusnya direncanakan. Keempat macam pola pertumbuhan industri itu adalah: 1) Pola Tahapan Sektor, pengembangan industri yang dikenal dengan pola tahapan atau sektor ini didasarkan pada urutan jenis industri menurut tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, yakni industri primer, industri manufaktur sampai kepada industri jasa atau tersier. Industri primer menjadi utama khususnya bila struktur perekonomian suatu negara sebagian besar berupa struktur agraris. Selanjutnya pola konsumsi masyarakat pada tingkat tertentu dapat mendorong bergesernya tahap primer menuju tahap industri manufaktur dan pada gilirannya akan sampai kepada industri jasa. 2) Pola Neoklasik, pola pengembang-

an industri yang berlandaskan mobilitas tenaga kerja dan modal yang bebas antar daerah, pola ini menghendaki pertumbuhan industri yang dihasilkan dari keseimbangan nisbah antara tenaga kerja dan modal secara proporsional. Namun kecenderungan yang terjadi umumnya mobilitas modal lebih dinamis daripada mobilitas tenaga kerja. 3) Pola Pusat dan Pinggiran, pengembangan industri yang didasarkan pada daerah kutub pertumbuhan. Pola ini menghendaki dampak pertumbuhan industri di daerah potensial dapat mendorong (*spread and trickle down effect*) pertumbuhan di daerah pinggiran. Namun kecenderungan yang terjadi adalah sebaliknya, pusat pertumbuhan justru akan dibanjiri oleh tenaga kerja dan modal. 4) Pola Landasan Ekspor, pengembangan industri dalam pola ini didasarkan pada hakekat dan tujuan industri untuk melayani ekspor. Selanjutnya peningkatan kegiatan ekspor dan hasilnya akan menimbulkan penangkaran (*multiplier effect*) industri lokal atau domestik yang menunjang industri pengolahan yang telah direncanakan secara seksama.

Mempertimbangkan beberapa hal utama yang penting dalam masyarakat kita seperti ketersediaan bahan baku dari sumberdaya alam dalam negeri, pola agraris dan kondisi geologis-geografis wilayah, serta persebaran penduduk dan kualitas budaya yang menunjang sains-teknologi maka pola perkembangan tahapan sektor yang diarahkan kepada pola landasan ekspor nampaknya menjadi pilihan yang seimbang dengan keutamaan-keutamaan di atas. Alasan pokok yang mendasar dari pilihan itu digantungkan pada hubungan antara sistem kependudukan dengan sistem ekonomi yang dapat diilustrasikan menurut bagan di bawah ini:

Bagan di atas menunjukkan sistem kependudukan merupakan penyedia tenaga kerja bagi sistem produksi sekaligus pengguna hasil sistem produksi.

Oleh karena masyarakat Indonesia tergolong agraris maka industri yang tepat untuk dikembangkan adalah agroindustri yang memanfaatkan proses aktualisasi masyarakat agraris (Soewito, 1999, 5; Swasono, 1999, 12).



Perspektif Hukum Ekonomi terhadap Strategi Industrialisasi

F. Rahardjo Setiobudi

Penutup

Kajian ini pada dasarnya ditujukan sebagai alternatif atas upaya sigi industri yang hendak dikembangkan di kemudian hari didasarkan atas evaluasi kebijakan masa lalu dan pertimbangan sosial internal bangsa kita. Walau tak hendak diajukan sebagai pemikiran dalam rangka perencanaan pembangunan namun setidaknya dapat dipertimbangkan untuk ditelaah lebih lanjut melalui survei mendalam atas variabel-variabel yang disuguhkan di muka.

Daftar Pustaka

- Ernest, Green, 1981, *Industrial Development*, University College, London.
- Kartasaputra, G. 1989, *Pola Pengembangan Industri*, Grafiti Press, Jakarta.
- Nasikun, 1989, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Parangtopo, 1994, *Kebijaksanaan Sains dan Teknologi dalam Pembangunan Ditinjau dari Aspek Pengalaman Pelaksanaannya di Negara-Negara Eropa Timur dan Negara Berkembang*, Makalah Seminar, UMS Surakarta.
- Parswons, Talcott, 1977, *Social Systems and The Evolution of Action Theory*, The Free Press, New York
- Ritzer, George, 1996, *Modern Sociological Theory*, International Editions, McGraw-Hill Book Co., Singapore.
- Swasono, Yudo.1994, *Tinjauan Kritis Terhadap Industrialisasi Di Indonesia*, Makalah Seminar, UMS Surakarta.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.